



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOTO

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOTO

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN,
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA
PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPOTO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026, maka perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, serta Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas;

c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penelola Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELOUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN ANGGARAN 2026.

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Spm, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa, Bendahara Pengeluaran Serta Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO,

ttd.

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyeleggaran dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN
SERTA PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN
ANGGARAN 2026.

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM,
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENUNJUKAN/PE NGANGKATAN
1.	Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P.	19750203 200604 1 015	Sekretaris KPU Kab. Jeneponto	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
2.	Arsyad, S.Kom., M.M.	19780601 200902 1 004	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
3.	Maryam, S.I.P.	19880602 201012 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
4.	Nuriaty Rini, S.E.	19780415 200901 2 006	Pranata Pengelolaan Keuangan APBN (Mahir)	Bendahara pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto

5.	F. Rukmana Zainal, S.E	19840910 200312 2 004	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pejabat pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
6.	Kasnawati, S.Sos.	19780518 200701 2 003	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
7.	Nabila Poppy Saputri. R, S.H	20011114 2025 6 2 008	Penyusung Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO,

ttd.

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyeleggaran dan Hukum

